

pembahasan sampai dengan tahap penyelesaian sehingga yang semula berupa rancangan peraturan daerah berubah menjadi suatu peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Anwar C. SH.,MH., Dr. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang, 2011.
2. Esmi Warassih, Prof Dr. SH.,MS. *Pranata hukum,,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.
3. Esmi Wirasih, Prof. Dr. SH., MS., *Materi perkuliahan*, di PDIH Univ. Islam Sultan Agung Semarang, 13 Juni 2015.
4. Hamzah Halim, SH., MH., Dr. Dan Kemal Redindo Syahrul Putera, SH. *Cara praktis menyusun dan merancang Peraturan Daerah.* Kencana Prenada Media Grup, 2013
5. Jazim Hamidi, Dr. SH., MH., Hermeneutika Hukum, UB Press, Malang 2011.
Khasan Effendy, *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*, Indra Prahasta, Bandung, 2010,

6. Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*,Alfabeta, Bandung, 2012.
7. Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, *Praktek Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal Yang Kaya*, dalam Solistyowati Irianto & Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009,
8. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2002,
9. Tjahjanulin Domai. MS. Dr. *Sound Governance*, UB Press, Malang, 2011.
10. Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan*, Nuansa & Penerbit NusaMedia,Bandung 2010.
11. Jazim hamidi, Dr. S.H. M.H. Mustafa Lutfi, S.Pd. S.H.M.H. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintash Daerah (the turning point local autonomy)*, UB Press, Malang 2011.
12. Nuruddin Hady, *Teory konstitusi dan negara Demokrasi (paham konstitutionalisme Demokrasi di Indonesia pasca amandemen UUD 1945) edisi revisi*, Setara Press, Malang, 2016.
13. Jazim hamkidi, Dr., S.H., M.H. *Hermeneitika Hukum*,UB. Press, Malang, 2011.
14. H.M. Burhan Bungin, Prof. Dr. S.Sos, M. Si, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*.Kencana Prenadamedia Grup, 2005.

15. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., *Hukum Otonomi Daerah (negara kesatuan, daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus)*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
16. Daniel Zuchron, *Menggugat manusia dalam Konstitusi (kajian filsafat atas UUD 1945 pasca amandemen)*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2017.
17. Sahya Anggara, Dr. M.Si, *Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia Bandung, 2013.
18. Fajlurrahman Jurdi, *Teori negara Hukum*, setara Press, Malang, 2016.
19. Sunaryati hartono, Prof., Dr., C.F.G., S.H., *Penelitian Hukum Di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung 2006.
20. Tjahjanulin Domai, Dr. MS. *Sound Governance*, UB. Press, Malang. 2011.
21. Ilham Yuli Isdiyanto S.H., M.H., *Rekonstruksi Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
22. Suteki, Prof., Dr., S.H., M.Hum, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015.
23. Didik Sukriono, Dr., S.H., M.H., *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi (kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, otonomi daerah dan desa pasca perubahan konstitusi)*, Setara Press, Malang, 2013.
24. Mukhlis taib, DR. S.H., M.H., *Dinamika perundang-undangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
25. John W. Creswell, *Research Design Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
26. Ramlan Surbakti, *Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta 2010

27. Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014.
28. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
29. Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah (desentralisasi, Demokratisasi dan akuntabilitas pemerintah daerah)*, LIPI Press, Jakarta 2007.
30. Jazim Hamidi, DR. SH., MH., Kemilu Mutik, SH., MH., *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
31. Siti Aminah, DR. *Kuasa Negara pada ranah politik Lokal*,, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014.
32. Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2001.
33. Moh. Mahfud MD, Prof. DR. SH.SU. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (studi tentang interaksi politik dan kehiduan ketatanegaraan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
34. Bambang Yudoyono, Drs. M.Si, *Otonomi Daerah (desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur PEMDA dan anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
35. Leo Agustino, *Politik Lokal dan otonomi daerah*, ALFABETA, Bandung, 2014,
36. Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, *Pelayanan Publik Baru dari manajemen STEERING ke SERVING*, kreasi wacana, bantul, 2013
37. Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good governance melalui pelayanan publik*, Gajah Mada University Press, 2006.

38. Surajuddi,Dr. Sh. Mh., Fathurohman, Dr. SH. MH., Zulkarnain, SH., MH., *LEGISLATIF DRAFTING*, setara Press, Malang,2016
39. W. Riawan Tjandra Dr. SH. M,Hum, *Hukim Administasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
40. H. Andi Pangerang Moenta Prof.Dr. SH. MH.DFM., H. Syafaat Anugrah Pradana, SH. MH. Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, depok, 2017.
41. Satjipto Rahardjo, Prof. Dr. SH. Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta,2009
42. Satjipto Rahardjo, Prof. Dr. SH, membedah Hukum progresif, Kompas, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Pancasila
2. Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang –Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Jurnal Hukum/ hasil penelitian

1. Disertasi :LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI: ANALISIS INTERAKSI POLITIK DAN HUKUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR . Oleh ANIS IBRAHIM

D. Website

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau

2. International Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS)
ISSN(P): 2319-393X; ISSN(E): 2319-3948
Vol. 4, Issue 3, Apr - May 2015, 67-84

1. © IASET

3.